



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 328 TAHUN 2020  
TENTANG

KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS KOMISI PENILAI DAN SEKRETARIAT KOMISI  
PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN  
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Komisi Penilai, Tim Teknis Komisi Penilai dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Komisi Penilai, Tim Teknis Komisi Penilai, dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Komisi Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi yaitu memberikan rekomendasi kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup kepada Walikota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
- KETIGA** : Tim Teknis Komisi Penilai sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi yaitu melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas Komisi Penilai Amdal (KPA), Analisis Dampak Lingkungan (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Komisi Penilai Amdal (KPA).
- KEEMPAT** : Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi yaitu menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen AMDAL dan Permohonan Izin Lingkungan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 cq Kegiatan Koordinasi Amdal pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 18 Februari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 328 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS KOMISI  
 PENILAI DAN SEKRETARIAT KOMISI  
 PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK  
 LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**SUSUNAN KOMISI PENILAI  
 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)**

No.	Jabatan Dalam Komisi	Jabatan Dalam Dinas	Tugas
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap anggota	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Memberikan rekomendasi dan menilai dokumen AMDAL
2.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL
3.	Anggota tetap	1. Wakil dari Bappeda Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		2. Wakil dari DLH Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		3. Wakil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		4. Wakil dari Badan Pertanahan Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		5. Wakil dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		6. Wakil dari Bagian Hukum Sekda Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		7. Wakil dari Organisasi Dinas Lingkungan Hidup/LSM	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 328 TAHUN 2019  
TENTANG  
KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS KOMISI  
PENILAI DAN SEKRETARIAT KOMISI  
PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK  
LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**SUSUNAN TIM TEKNIS**  
**KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**  
**(AMDAL)**

No.	NAMA DAN NIP	Jabatan Dalam Komisi	Tugas
1	2	3	4
1.	DWI NANIEK M, ST NIP. 19761110 20003 2 004	Ketua Merangkap Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
2.	Ir. H. M. MAKHMUD, MS NIP. 19650328 198803 1 009	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
3.	Ir. Hj. LILY DWIYANTI, MS NIP. 19620304 198904 2 001	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
4.	Ir. H. M. SYAHRANSYAH, MS NIP. 19620522 108903 1 008	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
5.	H. WAHYU HARDI CAHYONO, S. PI, MS NIP. 19690410 199402 1 001	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
6.	ANTUNG NUR'AIN, ST NIP. 19800731 201001 2 008	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
7.	ERNAWATI, SH, MH NIP. 19670210 199103 2 013	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
8.	Dr. EKA RAHAYU NORMASARI, ST, MM, M.Si NIP. 19770320 200604 2 019	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL

<b>No.</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>Jabatan Dalam Komisi</b>	<b>Tugas</b>
1	2	3	4
9.	Ir. H. JUANDA, MS	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 328 TAHUN 2020  
TENTANG  
KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS KOMISI  
PENILAI DAN SEKRETARIAT KOMISI  
PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK  
LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI  
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)**

No.	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1	2	3	4
1.	Kepala Seksi Pengkajian AMDAL, UKL dan UPL Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Koordinator	Menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan
2.	Staf Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan
3.	Staf Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan
4.	Staf subbag umum dan kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA